

Isu Strategis Program TIK 2020 Tingkat Kota Parepare

A. Pendahuluan

- Perencanaan TIK sangat dibutuhkan pada saat sekarang untuk menjembatani transisi antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang dihadapi
- Untuk memahami isu-isu strategis bidang TIK, harus memahami dan melakukan *assessment* terhadap kondisi TIK, agar kita tidak terjebak dalam idealisasi perencanaan yang pada akhirnya menghasilkan perencanaan yang tidak membumi
- Perkenankan pada kesempatan ini, saya selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare untuk memaparkan melalui forum yang berharga ini seperti apa implementasi dan kondisi-kondisi serta tantangan yang kami hadapi dalam pengembangan TIK, khususnya di Kota Parepare selama tiga tahun terakhir (2016-2019) sebagai bahan referensi bagi forum ini dalam diskusi nanti.
- Alhamdulillah, sejak tahun 2016 kami telah memiliki Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) yang dibuat oleh Balai Besar Pengembangan SDM dan Penelitian Kominfo Makassar. Keberadaan RITIK ini tentu sangat penting sebagai *guideline* Pemerintah Kota Parepare dalam perencanaan, implementasi serta evaluasi pembangunan Bidang TIK di Kota Parepare, baik itu pada elemen infrastruktur, aplikasi maupun konten.

1. Infrastruktur

- Pada dasarnya untuk pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, Kota Parepare telah memiliki arah yang jelas karena telah tertuang dalam RPJMD 2018-2023. Dalam RPJMD Kota Parepare Tahun 2018-2023, salah satu program prioritas Pemerintah Kota Parepare adalah mewujudkan diri sebagai kota pintar (Smart City). Pemerintah Kota Parepare juga telah memiliki Perda Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sebagai payung hukum dalam menyelenggarakan layanan pemerintahan berbasis TIK.
- Selain itu, pembangunan infrastruktur TIK di Kota Parepare tentu harus selaras dengan kebijakan-kebijakan terkait TIK dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Salah satunya misalnya adalah kebijakan pembangunan infrastruktur *data center*, yang awalnya kami berencana membangun infrastruktur sendiri secara fisik, namun karena ada moratorium terkait hal ini, maka

Pemerintah Kota Parepare memutuskan untuk membangun *data centre* dalam bentuk *server cloud* yang dikerjasamakan dengan Telkom Sigma.

- Hanya saja, terkait kebijakan moratorium ini mungkin kami dan juga forum ini dapat diberikan pemahaman lebih jauh oleh Dewan TIK Nasional, karena di beberapa daerah dan juga kementerian, pembangunan fisik *data center* tetap dapat dilakukan oleh daerah dan kementerian meski ada kebijakan moratorium melalui Perpres Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia.
- Tantangan yang kami hadapi dalam pengembangan dan pemanfaatan TIK lebih pada kurang kuantitas dan kualitas SDM bidang TIK, baik di Dinas Kominfo maupun di SKPD lain. Saat ini hampir setiap aktifitas pengembangan dan pemanfaatan TIK sebagian besar masih dilaksanakan oleh masing-masing SKPD, Kominfo lebih pada fungsi teknis, meski dalam beberapa tahun terakhir kami mencoba melakukan intervensi terhadap masalah ini melalui intervensi kebijakan dan anggaran.
- Kota Parepare telah memiliki Dewan TIK Kota, juga payung hukum setingkat Perda yang pada prinsipnya dapat didayagunakan untuk melakukan kontrol dan asistensi terhadap masalah perencanaan dan implementasi TIK di SKPD dalam lingkup Pemkot Parepare.
- Ada pemikiran, ke depan dengan mempertimbangkan aspek topografi dan konstruk daerah, Kota Parepare membangun *backbone* jaringan infrastruktur sendiri untuk meng-kanalisasi berbagai aplikasi antar SKPD serta kebutuhan jaringan *local networking* dalam wilayah Kota Parepare.

2. Pengembangan Aplikasi

- Tantangan dalam implementasi pengembangan system informasi dan aplikasi yang dihadapi Kota Parepare adalah lebih pada keberadaan SDM atau orang-orang yang terlibat dalam pengembangan system informasi di setiap SKPD serta *supporting* dan perumusan tujuan akhir pada tingkat manajemen.
- Masalah ini semakin terasa jika system yang akan dibangun adalah system informasi yang terintegrasi, baik antar SKPD maupun antar program. Di Dinas Kesehatan Kota Parepare misalnya, untuk mengintegrasikan sistem dan data yang ada di beberapa program saja mengalami kendala, karena perumusan tujuan akhir setiap aplikasi pada masing-masing program, basic datanya berbeda-beda. Belum lagi kita bicaara tujuan dari setiap sistem aplikasi tersebut. Misalnya, aplikasi untuk yang digunakan di Program Penuntasan Penyakit TBC dengan aplikasi yang digunakan untuk Program penanganan penyakit DBD berbeda, dan keduanya belum dapat

diintegrasikan. Juga rencana Pemerintah Kota Parepare mengintegrasikan antara aplikasi *e-planning* yang ada di Bappeda dengan *e-budgeting* (SIPKD) yang ada di Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah. Ini Masalah serius.

- Tantangan kedua adalah pada tingkat user atau pengguna yang tidak memahami dengan baik kemampuan optimal teknologi yang ada, khususnya dalam membantu proses bisnis yang mereka kerjakan setiap hari. Begitu pula pada tahap analisa developer, juga bisa jadi tidak mengetahui dengan benar proses bisnis yang berlangsung atau juga karena standar dari developer yang kurang dalam membuat program, sehingga program aplikasi yang dihasilkan adalah program yang baik dari kacamata developer, tetapi bukan pada tingkat user.
- Idealnya kedepan, sebagaimana telah diamanahkan oleh Dokumen RITIK Kota Parepare, proses perencanaan pengembangan aplikasi, harus dimulai dari pemahaman kita terhadap proses bisnis yang ada di setiap SKPD dan program. Dengan pemahaman ini, kita bisa menentukan kebutuhan dan sisteem aplikasi seperti apa yang kita akan bangun.
- Karena itu, seperti penekanan pada RITIK Kota Parepare, pengembangan TIK Kota Parepare kedepan harus dijalankan dalam dua domain yang masing-masing memiliki peran dan fungsi tersendiri, yakni Dinas Kominfo selaku eksekutor dan Tim Reformasi Birokrasi selaku perencana. Segala kebutuhan dan masalah–masalah integrasi aplikasi dipikirkan oleh Tim Reformasi Birokrasi dan setelah ditemukan dan dirumuskan seperti apa kebutuhan TIK yang diinginkan, maka barulah didorong ke Kominfo untuk dieksekusi. Saya kira keduanya dapat disinergikan dan tidak lagi Dinas Kominfo menjadi pemain dan penanggung jawab tunggal dalam pengembangan TIK ke depan.

Terima kasih.